

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transparansi informasi publik erat kaitannya dengan akuntabilitas sebuah pemerintahan (Azka, 2022). Isu transparansi lebih diperhatikan sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan. Semua informasi publik seharusnya dapat diakses dengan cepat, murah, tepat, dan sederhana. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi informasi publik adalah melalui implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam lingkungan pemerintahan. TIK mengintegrasikan berbagai sistem, data, dan informasi sehingga memungkinkan proses pengelolaan pemerintahan menjadi lebih baik (Raghavendra *et al.*, 2021). Penggunaan TIK dalam pemerintahan tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *E-Government* yang mewajibkan setiap instansi di tingkat pusat dan daerah untuk memiliki *E-Government* dalam bentuk situs web instansi (Kementerian PANRB, 2020).

Sebagai bentuk transparansi informasi publik, pemerintah dapat melakukan pengungkapan laporan keuangannya secara sukarela, misalnya menggunakan internet di situs web pemerintah daerah (Warsidi *et al.*, 2017). Situs web pemerintah daerah merupakan representasi virtual berbasis internet dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kemajuan teknologi, pengguna internet, di era ini adalah masyarakat, menginginkan kemudahan dan keakuratan dalam mengakses informasi terkait pemerintahan (Oktaviani *et al.*, 2020).



Penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan menggunakan situs web dapat mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan daerah karena situs web dapat diakses setiap saat. Hal tersebut juga merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Publikasi laporan keuangan melalui situs web perusahaan dan pemerintah disebut dengan istilah *Internet Financial Reporting* (IFR) (Murdayanti dan Khan, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangannya secara digital menggunakan IFR, tetapi pelaksanaan IFR oleh pemerintah daerah di Indonesia masih belum maksimal. Pengungkapan laporan keuangan yang bersifat sukarela (*voluntary*) masih terbilang langka (Yustikasari, 2018). Penelitian Putra *et al* (2023) menemukan selama tahun 2018-2021 pemerintah daerah di Indonesia tidak konsisten melaksanakan IFR secara sukarela melalui situs webnya, terutama pada tahun 2018 lebih banyak pemerintah daerah yang tidak melaksanakan IFR dibanding pemerintah daerah yang melaksanakan IFR.

Penelitian Indaryani dan Rahayu (2023) menemukan pada tahun 2019 ada 24 pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan yang telah menerapkan IFR. Sedangkan pemerintah kabupaten dan kota yang belum menerapkan IFR berjumlah 32 pemerintah kabupaten dan kota. Pelaksanaan IFR dikaji menggunakan teori sinyal. Berdasarkan senjangan penelitian terkait, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR pada pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023 dengan menggunakan variabel berbeda. Selain itu,

ini juga akan mengkaji pengungkapan sukarela menggunakan IFR pada



pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan menggunakan teori agensi dan teori sinyal.

Penelitian mengenai determinan pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota sebelumnya dilakukan oleh Warsidi *et al* (2017), Azis dan Hapsari (2020), Moehardiono dan Yuliati (2021), Rahayu dan Khasanah (2022), Putri dan Setiawan (2022), Narulitasari dan Zafira (2023), Putra *et al* (2023), dan Mariasari (2023). Semakin baik opini audit yang didapatkan, maka pengungkapan sukarela menggunakan IFR akan meningkat (Moehardiono dan Yuliati, 2021; Rahayu dan Khasanah, 2022), tetapi penelitian Narulitasari dan Zafira (2023) menemukan bahwa opini audit tidak memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR. Ukuran pemerintah daerah memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR (Azis dan Hapsari, 2020; Putra *et al.*, 2023), tetapi penelitian Moehardiono dan Yuliati (2021) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh. Kekayaan daerah memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota (Warsidi *et al.*, 2017; Mariasari, 2023), tetapi penelitian Putri dan Setiawan (2022) menunjukkan kekayaan pemerintah daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk membuktikan apakah opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kekayaan daerah memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan, terutama pada tahun 2020-2023.

## 1.2 Rumusan Masalah



alam latar belakang menunjukkan bahwa secara aturan, pemerintah wajibkan untuk menyajikan informasi keuangannya secara digital sejalan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024. Kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang belum menyajikan informasi keuangan daerah secara digital menggunakan IFR. Di Pulau Kalimantan, hanya 24 dari 56 pemerintah kabupaten dan kota yang melakukan pengungkapan sukarela menggunakan IFR pada tahun 2019. Berdasarkan senjangan penelitian yang ada, penelitian ini ingin membahas pertanyaan berikut :

1. Apakah opini audit memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan?
3. Apakah kekayaan daerah memengaruhi pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pengaruh opini audit yang diterima terhadap pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan.
2. Untuk memperoleh pengetahuan dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan.
3. Untuk memperoleh pengetahuan dan menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan.



#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur terkait teori agensi dan teori sinyal dalam konteks pengungkapan informasi keuangan secara sukarela menggunakan IFR, khususnya dalam sektor publik dan pemerintah daerah. Berdasarkan teori agensi, terdapat hubungan antar prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah). Penelitian ini mendalami faktor yang memengaruhi agen untuk melakukan pengungkapan sukarela, yang secara tidak langsung membantu memperkuat teori agensi dalam konteks pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga terkait dengan teori sinyal, di mana pengungkapan sukarela menggunakan IFR berfungsi sebagai sinyal positif yang dikirimkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman bagaimana pengungkapan sukarela digunakan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

##### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan, dalam meningkatkan kualitas pengungkapan LKPD melalui internet.

– engan memahami determinan pengungkapan sukarela, pemerintah



daerah dapat lebih bijaksana dalam mengalokasikan sumber daya untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori mengenai relasi prinsipal dan agen, yang dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen dan agen diharapkan dapat bertindak sesuai kehendak prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006). Teori agensi berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan antar prinsipal dan agen melalui pembuatan kontrak yang tepat. Relasi prinsipal dan agen dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis kebijakan publik yang erat kaitannya dengan masalah keagenan, yaitu asimetri informasi (Bergman dan Lane, 1990).

Masalah keagenan terjadi akibat perbedaan kepentingan prinsipal dan agen; dan prinsipal tidak memiliki pengetahuan apakah agen telah bertindak secara tepat (Eisenhardt, 1989). Pada sistem pemerintahan daerah, masyarakat yang berperan sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan di daerah kepada pemerintah yang berperan sebagai agen. Teori agensi dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana masyarakat harus mengawasi tindakan dan menilai akuntabilitas pemerintah, yang dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat (Barreto, 2015). Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan (Moehardiono dan Yulianti,

hal ini relevan dalam pengungkapan sukarela, di mana transparansi



informasi menjadi kunci untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi dan konflik kepentingan antar pemerintah dan masyarakat

### 2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal menyatakan bahwa kelompok yang jumlah informasinya lebih banyak dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi dengan cara membagikan informasi tersebut kepada pihak lain (Morris, 1987). Organisasi yang memiliki informasi positif cenderung mengungkapkan informasi tersebut secara sukarela (Connely *et al.*, 2011). Dalam konteks pemerintahan, pemerintah adalah pihak yang mempunyai lebih banyak informasi dan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan informasi. Pengungkapan sukarela menggunakan IFR merupakan salah satu mekanisme untuk mengirim sinyal positif oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan kondisi keuangan dan tata kelola yang baik kepada masyarakat (Verrecchia, 2001).

### 2.1.3 Pengungkapan Sukarela

Ada dua jenis Pengungkapan LKPD, yaitu pengungkapan yang sifatnya wajib dan pengungkapan yang sifatnya sukarela. Pengungkapan yang sifatnya wajib adalah pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan dan standar, sedangkan pengungkapan yang sifatnya sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah di luar dari pengungkapan yang sifatnya wajib (Hassan dan Marston, 2010). Pengungkapan yang sifatnya sukarela didefinisikan oleh Meek *et al.* (1995: 555) (dalam Shehata, 2014) sebagai “pilihan bebas dari pemerintah untuk menyediakan informasi akuntansi dan informasi lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan



mereka”. Pengungkapan sukarela merupakan salah satu metode untuk atkan transparansi kepada masyarakat. LKPD yang bisa diakses secara

mudah dan kapan saja oleh masyarakat menggunakan IFR menunjukkan peningkatan transparansi pemerintah daerah kepada publik (Prima dan Verawaty, 2018).

#### **2.1.4 Internet Financial Reporting**

Internet merupakan solusi bagi beberapa masalah pelaporan secara umum, seperti informasi yang kurang dan tidak tepat waktu, melalui peningkatan ketersediaan informasi, pelaporan secara *real time*, dan pelaporan yang lebih rinci (Jones dan Xiao, 2004). *Internet Financial Reporting* (IFR) ialah metode pengungkapan LKPD melalui media internet. Dibandingkan dengan metode pelaporan keuangan tradisional yang menggunakan media cetak atau distribusi fisik, IFR memiliki beberapa keunggulan, seperti aksesibilitas yang lebih luas, distribusi informasi yang lebih mudah, serta kemampuan untuk memperbarui data secara *real-time* (Pirchegger & Wagenhofer, 1999).

Dalam konteks sektor publik, IFR berperan penting dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan melalui internet memungkinkan informasi terkait anggaran, realisasi, serta penggunaan dana publik dapat diakses dengan mudah dan lebih luas oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta lembaga pengawas (Styles dan Tennyson, 2007). Penggunaan IFR oleh pemerintah daerah selaras pada prinsip *good governance*, tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pemerintahan.

#### **2.1.5 Opini Audit**

Dalam opini audit, auditor memberi pendapatnya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku *generally accepted accounting standard* (GAAP) (Mulyadi, 2014). Opini dikeluarkan oleh auditor setelah memeriksa laporan keuangan entitas. Pada



pemerintah daerah, opini audit dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran penyajian LKPD sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menerangkan bahwa ada empat jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK atas kewajaran LKPD, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini WTP diberikan oleh BPK setelah auditor mengonfirmasi jika LKPD yang diperiksa disajikan dengan wajar sesuai SAP. Opini WDP diberikan ketika LKPD yang diperiksa disajikan secara wajar sesuai dengan SAP, tetapi ada beberapa unsur yang dijadikan pengecualian yang tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Opini TW diberikan ketika LKPD tidak disajikan secara wajar sesuai SAP, tetapi tidak ada pembatasan lingkungan audit bagi auditor. Opini TMP terjadi ketika auditor dibatasi lingkup auditnya sehingga tidak cukup untuk membuat opini.

### 2.1.6 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan total pendapatan daerah selama satu tahun (Kristanto, 2009). Semakin besar jumlah pendapatan daerah, semakin besar juga ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan sukarela melalui media internet (Azis dan Hapsari, 2020). Pemerintah daerah yang lebih besar cenderung memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan kondisi keuangannya, karena memiliki kapabilitas besar dalam hal finansial dan teknologi. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar umumnya diharapkan mempunyai tingkat insi yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan, karena mereka a sumber daya publik yang lebih besar. Sebaliknya, pemerintah daerah



yang lebih kecil mungkin menghadapi keterbatasan anggaran dan infrastruktur, sehingga pengungkapan informasi menggunakan IFR menjadi lebih terbatas. Pemerintah daerah yang lebih besar diharapkan memiliki kemampuan lebih dalam melaksanakan praktik pelaporan keuangan yang selaras pada prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas dan transparansi, terutama melalui penggunaan teknologi informasi seperti IFR.

### 2.1.7 Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah berhubungan dengan kinerja keuangan daerah. Kekayaan daerah diukur menggunakan total aset daerah (Mariasari, 2023). Pemerintah daerah dengan kekayaan daerah yang besar cenderung melakukan praktik IFR (Laswad *et al.*, 2005). Semakin besar kekayaan daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih transparan terhadap pelaporan keuangannya. Pelaporan dan pengawasan terhadap kekayaan daerah perlu dilakukan secara akurat dan ketat, sehingga diperlukan metode pelaporan dan pengawasan yang efektif dan efisien. Metode IFR dapat digunakan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan serta pengawasan terhadap kekayaan daerah melalui LKPD.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Pengungkapan LKPD melalui *Internet Financial Reporting* (IFR) mengindikasikan adanya transparansi dan akuntabilitas pada penyajian informasi keuangan. Beberapa studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi determinan dari pengungkapan menggunakan IFR, khususnya di pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa temuan empiris dari penelitian terdahulu mengenai determinan pengungkapan sukarela menggunakan IFR oleh pemerintah daerah.



daryani dan Rahayu (2023) melakukan penelitian menggunakan tiga yaitu tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat, dan kekayaan

pemerintah daerah. Sampel penelitian berasal dari 56 pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat, dan kekayaan daerah signifikan dan positif secara simultan terhadap pengungkapan LKPD pada situs web resmi pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat, dan kekayaan daerah memiliki pengaruh positif signifikan pada pengungkapan informasi keuangan pada situs web resmi pemerintah daerah.

Warsidi *et al* (2017) melakukan penelitian menggunakan lima variabel, yaitu ukuran pemerintah daerah, persaingan politik, ketergantungan pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan tipe pemerintah daerah. Sampel penelitian berasal dari 97 kabupaten dan 33 kota di seluruh Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa persaingan politik, ukuran pemerintah daerah, dan kekayaan daerah memiliki pengaruh positif pada pengungkapan menggunakan IFR, sedangkan ketergantungan pemerintah dan tipe pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan dengan pengungkapan menggunakan IFR.

Tingkat ukuran pemerintah daerah yang besar membuat masyarakat menginginkan transparansi keuangan daerah dari pemerintah sehingga mendorong pemerintah untuk terbuka dalam menyampaikan informasi keuangannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik oleh pemerintah. Kekayaan daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap pengungkapan menggunakan IFR oleh pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah yang besar membuat masyarakat lebih sadar dan menuntut transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah. Oleh

, pemerintah termotivasi untuk melakukan pengungkapan menggunakan



Putra *et al* (2023) melakukan penelitian menggunakan tiga variabel untuk menguji faktor pengungkapan menggunakan IFR oleh pemerintah daerah di Indonesia, yaitu opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan dana perimbangan. Sampel penelitian ini terdiri dari 66 kabupaten dan 27 kota di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan menggunakan IFR dan memotivasi pemerintah daerah untuk melaksanakan IFR, sedangkan opini audit berpengaruh pada pengungkapan menggunakan IFR tetapi kurang memotivasi pemerintah daerah untuk melaksanakan IFR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit memengaruhi pengungkapan menggunakan IFR secara negatif. Opini WTP kurang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan menggunakan IFR. Ukuran pemerintah daerah memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan menggunakan IFR karena peninjauan aset milik pemerintah daerah bertambah, sehingga peninjauan dari masyarakat semakin meningkat.

Moehardiono dan Yuliati (2021) meneliti pengaruh PAD, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2015-2019. Sampel terdiri dari delapan belas kabupaten dan lima kota. Hasil uji simultan menunjukkan PAD, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit memiliki pengaruh signifikan pada pengungkapan menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur selama tahun 2015-2019. Sedangkan uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh, tetapi opini audit memiliki pengaruh secara positif.



ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial karena pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang total asetnya masih

kurang sehingga belum melakukan pengungkapan menggunakan IFR. Semakin baik opini audit yang didapat, maka pengungkapan menggunakan IFR semakin meningkat karena mengindikasikan bahwa LKPD disajikan berdasarkan SAP dan telah memiliki Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik.

Rahayu dan Khasanah (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dan opini audit terhadap pelaporan menggunakan IFR oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2017-2020. Penelitian menemukan kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dan opini audit BPK secara simultan memiliki pengaruh pada IFR. Ukuran pemerintah daerah dan opini audit secara parsial memiliki pengaruh signifikan, tetapi kekayaan daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap IFR.

Narulitasari dan Zafirah (2021) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit pada IFR di Pulau Jawa. Sampel terdiri dari 52 kabupaten dan enam belas kota selama periode pelaporan tahun 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan umur pemerintahan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IFR, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR.

Hasil penelitian menunjukkan besar ukuran pemerintah daerah tidak menjamin pengungkapan menggunakan IFR oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2019 pemerintah Kota Surabaya yang memiliki total aset sebanyak 44 triliun per tahun tidak melakukan pengungkapan menggunakan IFR, sedangkan pemerintah Kota Probolinggo yang memiliki total aset sebesar 1,68 triliun per tahun melakukan



pengungkapan menggunakan IFR. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa opini audit atau selain WTP tidak memiliki pengaruh dalam pengungkapan

menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dari 134 pemerintah kabupaten/kota yang mendapat opini WTP, hanya 44,03% yang melakukan pengungkapan menggunakan IFR.

Mariasari (2023) melakukan studi untuk menguji bagaimana kekayaan daerah, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan tingkat pendidikan memengaruhi pengungkapan LKPD. Sampel penelitian ini terdiri dari 59 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2018-2021. Ditemukan bahwa kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan LKPD, sedangkan pendapatan per kapita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan tersebut.

Tinggi kekayaan daerah membuat tingkat pengungkapan menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota semakin tinggi pula. Pemerintah daerah yang memiliki aset besar biasanya memerlukan biaya pengawasan yang besar sehingga perlu metode yang efektif dan efisien untuk meminimalisasi biaya pengawasan tersebut, yaitu dengan melakukan pengungkapan menggunakan IFR.

Putri dan Setiawan (2022) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kekayaan daerah dan belanja daerah pada pengungkapan menggunakan IFR pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat selama tahun 2018-2020. Sampel terdiri dari sembilan belas kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan menggunakan IFR, dan belanja daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan menggunakan IFR.



kekayaan daerah tidak memengaruhi pengungkapan menggunakan IFR.  
ah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang memiliki kekayaan

daerah yang besar pada tahun 2018-2020 belum dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat transparansi pemerintah terhadap laporan keuangannya melalui internet. Belanja daerah memiliki pengaruh negatif signifikan, yang mengindikasikan jika semakin rendah belanja daerah, maka tingkat pengungkapan menggunakan IFR oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2018-2020 semakin tinggi. Sebaliknya, jika belanja daerah semakin tinggi, pengungkapan menggunakan IFR semakin rendah.

Aziz dan Hapsari (2020) melakukan penelitian menggunakan tiga variabel, yaitu ukuran pemerintah daerah, PAD (PAD), dan belanja daerah. Studi kasus dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2015-2018. Sampel penelitian terdiri dari delapan kabupaten dan kota di Jawa Timur. Penelitian ini menemukan ukuran pemerintah daerah, PAD, dan belanja daerah memiliki pengaruh yang simultan pada pengungkapan menggunakan IFR pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan positif secara parsial, yaitu apabila ukuran pemerintah daerah semakin besar maka tingkat pengungkapan menggunakan IFR semakin tinggi. Belanja daerah dan PAD tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan menggunakan IFR pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2015-2018.

Berikut ini adalah kumpulan penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini :



No	Peneliti	Variabel	Hasil	Posisi Penelitian	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Indaryani, A. N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Tingkat Kemandirian, Kesejahteraan Masyarakat dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan Tahun 2019-2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kemandirian</li> <li>2. Kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Kekayaan daerah</li> </ol>	Tingkat kemandirian daerah, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan. Secara parsial tingkat kemandirian, kesejahteraan, dan kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini meneliti satu variabel yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indaryani dan Rahayu (2023), yaitu kekayaan daerah.</li> <li>2. Penelitian ini menggunakan teori yang sama, teori sinyal</li> <li>3. Penelitian ini meneliti hal yang sama, yaitu IFR Pemerintah Daerah Kalimantan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini meneliti variabel opini audit dan ukuran pemerintah daerah.</li> <li>2. Penelitian ini menggunakan teori agensi.</li> <li>3. Penelitian ini meneliti IFR Pemerintah daerah Pulau Kalimantan tahun 2020-2023.</li> </ol>
2.	Warsidi., Rizkiyaningsih, W., Rusmana, O., & S. (2017). Determinants of Internet Reporting in Donesian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persaingan politik</li> <li>2. Ukuran pemda</li> <li>3. Kekayaan daerah</li> <li>4. Ketergantungan pemerintah daerah</li> </ol>	Persaingan politik, ukuran pemda, dan kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini meneliti dua variabel yang sama dengan penelitian yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini meneliti variabel opini audit</li> <li>2. Sampel penelitian ini adalah</li> </ol>



	Local Governments.	5. Tipe pemerintah daerah	pan melalui IFR. Sedangkan ketergantungan pemerintah daerah dan tipe pemerintah daerah tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan melalui IFR.	dilakukan oleh Warsidi <i>et al</i> , yaitu ukuran pemerintah daerah dan kekayaan daerah. Penelitian ini menggunakan teori yang sama, yaitu teori agensi dan teori sinyal	pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023
3.	Putra, N. P., Suhartini, D., & Dimayantisukiswo, W. H. (2023). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018-2021.	1. Dana perimbangan 2. Ukuran pemerintah daerah 3. Opini audit	Dana perimbangan dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan melalui IFR dan memotivasi pemerintah daerah untuk melaksanakan IFR, sedangkan opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan melalui IFR tetapi kurang	1. Penelitian ini meneliti dua variabel yang sama, yaitu ukuran pemerintah daerah dan opini audit	1. Penelitian ini meneliti variabel kekayaan daerah 2. Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023 3. Penelitian ini menggunakan teori agensi



			memotivasi pemerintah daerah untuk melaksanakan IFR.		dan teori sinyal
4.	Moehardiono, I. A., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur.	1. PAD 2. Ukuran pemda 3. Opini audit	PAD, ukuran pemda, dan opini audit berpengaruh signifikan. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan ukuran pemda tidak berpengaruh, tetapi opini audit berpengaruh secara positif.	1. Penelitian ini meneliti dua variabel yang sama, yaitu ukuran pemerintah daerah dan opini audit. 2. Penelitian ini menggunakan teori yang sama, yaitu teori agensi dan teori sinyal.	1. Penelitian ini meneliti variabel kekayaan daerah. 2. Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023.
5.	Rahayu, S., & Khasanah, F. W. N. (2022). Internet Financial Reporting: In the case of district and city governments in Central Java Province, Indonesia.	1. Kekayaan daerah 2. Ukuran pemda 3. <i>Leverage</i> 4. Opini audit	kekayaan daerah, ukuran pemda, leverage, dan opini audit BPK secara simultan berpengaruh pada pelaporan IFR. Secara parsial ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh	1. Penelitian ini meneliti tiga variabel yang sama, yaitu opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kekayaan daerah.	1. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori sinyal. 2. Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun



			h signifikan, namun kekayaan daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap pelaporan IFR.		2020-2023
6.	Narulitasari, D., & Zafira, R. (2021). Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure.	1. Umur pemda 2. Ukuran pemda 3. Opini audit	umur pemda berpengaruh positif signifikan terhadap IFR, sedangkan ukuran pemda dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR.	1. Penelitian ini meneliti dua variabel yang sama, yaitu ukuran pemerintah daerah dan opini audit.	1. Penelitian ini meneliti variabel kekayaan daerah. 2. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori sinyal. 3. Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023
7.	Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pada	1. Kekayaan daerah 2. Belanja daerah	kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan melalui IFR, dan belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	1. penelitian ini meneliti satu variabel yang sama, yaitu kekayaan daerah. 2. penelitian ini menggunakan	1. Penelitian ini meneliti variabel opini audit dan ukuran pemerintah daerah 2. Sampel penelitian ini adalah



	Pemerintah Daerah.		pengungkapan melalui IFR	teori agensi dan teori sinyal.	pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023
8.	Mariasari, V. (2023). Pengaruh Kekayaan Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekayaan daerah</li> <li>2. Jumlah penduduk</li> <li>3. Tingkat pendidikan</li> </ol>	kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi LKPD. Sedangkan pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap publikasi LKPD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini meneliti variabel yang sama, yaitu kekayaan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini meneliti dua variabel berbeda, yaitu opini audit dan ukuran pemerintah daerah</li> <li>2. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori sinyal.</li> <li>3. Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023</li> </ol>



9.	Azis, I., & Hapsari, D. W. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran pemerintah daerah</li> <li>2. Pendapatan asli daerah</li> <li>3. Belanja daerah</li> </ol>	ukuran pemda, PAD, belanja daerah secara simultan memengaruhi pengungkapan melalui IFR	1. Penelitian ini meneliti satu variabel yang sama, yaitu ukuran pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini meneliti dua variabel yang berbeda, yaitu opini audit dan kekayaan pemerintah daerah</li> <li>2. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori sinyal.</li> <li>3. Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan tahun 2020-2023</li> </ol>
----	---	---	--	--	---

Tabel 2.1 Kumpulan Penelitian Pendukung

